

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam perjalanan sejarah Indonesia, kerajaan telah menguasai wilayah Indonesia bahkan sebelum negara ini ada dan direncanakan untuk dibentuk menjadi suatu sistem pemerintahan berbentuk negara kesatuan. Salah satu kerajaan yang memiliki sejarah panjang dan masih bertahan hingga berdirinya negara ini yaitu Kasunanan Surakarta, yang merupakan pemekaran dari Kerajaan Mataram Islam. Setelahnya, Kasunanan Surakarta juga terbelah lagi menjadi dua dengan Kadipaten Mangkunegaran, yang merupakan satu kesatuan pemerintahan di bawah Kasunanan Surakarta.

Detik-detik revolusi yang digaungkan oleh para pejuang bangsa sejak tahun-tahun awal 1900-an merebak ke seluruh negeri, tidak terkecuali di Kasunanan Surakarta dan juga Kadipaten Mangkunegaran. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara VIII merupakan salah satu tokoh yang menjadi penguasa Mangkunegaran di masa-masa revolusi tersebut. Sebagai suatu kesatuan pemerintahan yang sudah berdiri terlebih dahulu, Kadipaten Mangkunegaran dihadapkan dengan pilihan untuk menyatakan bergabung dan menjadi satu dengan Indonesia, atau menjadi negara independen sendiri.

Langkah berani dikeluarkan oleh Mangkunegara VIII yang memerintah di usianya yang masih muda dengan mengeluarkan sebuah maklumatnya pada 1 September 1945 yang menyatakan jika Mangkunegaran merupakan suatu kesatuan dengan Indonesia yang berbentuk Daerah Istimewa. Dari pihak Indonesia juga menghormati keputusan ini dengan dibentuknya suatu Daerah Istimewa, yang terbagi menjadi dua yaitu Daerah Istimewa Surakarta bersama dengan Kadipaten Mangkunegaran di dalamnya (Samrono, 2010, hlm. 5).

Revolusi terjadi di Indonesia di sekitaran tahun-tahun awal setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan dikumandangkan. Dalam masa-masa tersebut Belanda kembali menginginkan kekuasaan yang dahulu telah dibiarkannya untuk dikuasai Jepang selama beberapa lama, salah satu aksinya untuk meruntuhkan kembali negara yang baru merdeka itu dengan membuat propaganda (Widjaja, 1988, hlm. 52). Dalam masa-masa genting ini Mangkunegara VIII di usianya yang masih

Muhamad Rio Novandana, 2023

*DAMPAK GERAKAN ANTI SWAPRAJA BAGI KADIPATEN MANGKUNEGARAN DI MASA PEMERINTAHAN MANGKUNEGARA VIII (1944-1974)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

belum menginjak 30 tahun memerintah di Kadipaten Mangkunegaran. Kondisi semakin kacau semasa Indonesia saat itu berbentuk RIS (Republik Indonesia Serikat) atas hasil dari diadakannya Konferensi Meja Bundar (KMB). Dengan Jakarta yang diduduki oleh Belanda, ibukota dipindahkan ke Yogyakarta dalam masa-masa genting tersebut. Pengambilan Daerah Istimewa Surakarta tersebut tentunya membuat adanya perubahan di bidang politik pemerintahan dan juga sosial di Surakarta. Ide dari adanya penghapusan wilayah swapraja ini memiliki ketersinambungan dengan keadaan di masa-masa pendudukan Jepang. Dimana pada masa tersebut banyak sekali pegawai yang berasal dari pemerintah daerah yang telah ada, dan ditempati kedudukan yang tinggi dalam pemerintahan. Hal ini berbanding terbalik dalam masa-masa Agresi Militer dimana Belanda kembali menduduki Indonesia di sekitaran tahun 1946.

Salah satu faktor tersebut yang menjadikan orang-orang yang sebelumnya memiliki pengaruh dan juga sebagai suatu wakil dari suatu wilayah ingin agar wilayahnya menjadi tanggung jawab dari dirinya sendiri, tidak dibawah oleh Keraton ataupun Kadipaten. Faktor lainnya masa-masa sulit yang sedang terjadi di Surakarta, mengingat adanya suatu pola pemerintahan baru setelah kekalahan Jepang menyebabkan adanya suatu keadaan yang menjadikan Surakarta di masa tersebut tidak berjalan dengan baik di sosial maupun ekonominya. Adanya faktor eksternal lain juga menyebabkan diturunkannya surat untuk mengambil daerah Swapraja Surakarta dalam Peraturan Presiden 15 Juli No. 16/SD/1946, yang menjadikan pemerintahan Kasunanan Surakarta secara *de jure* dan *de facto* runtuh (Ibrahim, 2004, hlm. 166).

Membahas mengenai Mangkunegara VIII akan banyak membahas mengenai kontribusi beliau yang sangat besar di masa-masa awal pemerintahan Indonesia. Sebagai negara baru, pada masa tersebut pemerintahan di Indonesia belum begitu stabil baik dari segala aspek, terlebih lagi dari ekonomi dan pemerintahan. Ditambah lagi dengan usia dari Mangkunegara VIII yang pada saat memerintah masih berusia sekitar 25 tahun, menyebabkan adanya suatu kekaguman dalam hal pemikiran dan tindakan yang dilakukan di masa-masa tidak menentu tersebut. Kebijakan serta tindakan yang diambil merupakan suatu buah pemikiran yang dianggap oleh penulis menjadi suatu hal yang perlu untuk diapresiasi dan dijadikan

hal yang dikagumi dari sosok Mangkunegara VIII. Dalam hal ini juga negara bekas kerajaan seperti Kasunanan Surakarta bersama Kadipaten Mangkunegaran dan Kesultanan Ngayogyakarta dengan Kadipaten Pakualaman banyak menyumbang demi keberlanjutan negara ini.

Di masa-masa Konferensi Meja Bundar (KMB) dalam Arsip Konferesinya pada tanggal 1 Desember 1949 yang di dalamnya merupakan hasil notulensi mengenai rapat pejabat-pejabat Mangkunegaran dan sebagai penyambutan bagi kedatangan kembali Mangkunegara VIII dari KMB. Kearsipan mengenai dana yang disalurkan oleh Mangkunegaran kepada para pejuang di masa-masa tersebut juga dengan nominal yang bukan main-main dan juga tidak hanya sekali. Dalam beberapa arsip yang ditemukan terdapat bantuan dana untuk biaya perjuangan termasuk biaya makan, pelatihan, dan pendidikan tentara di masa Surakarta di bawah pemerintahan militer.

Penulisan ini dirasa penting oleh karena mengingat belum banyaknya penelitian mengenai pemerintahan Mangkunegara VII dan juga kondisi Kadipaten Mangkunegaran di bawah pemerintahannya setelah terjadinya Gerakan Anti Swapraja. Hal ini didasari oleh hasil pencarian penulis, khususnya dalam skripsi yang ditemukan di web universitas yang tidak banyak menyimpan mengenai topik penelitian ini. Perjuangan yang begitu besarnya dirasa perlu menjadi suatu momen sejarah yang banyak diketahui oleh khalayak umum. Diharapkan dengan adanya penelitian yang dilakukan mengenai Mangkunegaran ini bisa menjadikan eksistensi Kota Budaya Surakarta salah satunya terangkat kembali. Selain itu juga bisa menjadi suatu sumber penelitian lainnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Mangkunegara VIII serta kejadian sejarah di sekitar tahun 1944-1974 sesuai dengan lingkup waktu penelitian ini.

Terdapat alasan dibalik pengambilan lingkup tahun penelitian kali ini. Tahun awal yang diambil adalah di tahun 1944, pengambilan tahun ini sesuai dengan tahun naik tahta Mangkunegara VIII sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya di Kadipaten Mangkunegaran menggantikan Mangkunegara VII yang wafat di tahun yang sama. Mangkunegara VIII merupakan putra tertua dari Mangkunegara VII dengan nama lahir Bendara Raden Mas Haria Hamijoyo Saroso, yang setelah ayahnya wafat kemudian dinaikkan menjadi putra mahkota dengan gelar Kanjeng

Pangeran Hamijoyo Saroso. Selain merupakan putra tertua dari Mangkunegara VII, K.P Hamijoyo Saroso juga memiliki pendidikan yang mumpuni. Pengalaman dan pendidikannya dimulai di *Europese Lagere School (ELS)* lulus tahun 1932, *Mur Uithebreid Lager Onderwijs (MULO)* lulus tahun 1936, *Algemene Middelbaare School (AMS)* lulus tahun 1939, dan yang terakhir *Corps Opleiding Reserve Officer (CORO)* lulus tahun 1942 berpangkat Sersan CORO (Setiawan, 2013, hlm. 4).

Pengambilan tahun akhir yaitu di tahun 1968 didasari pada dibukanya Pura Mangkunegaran kepada umum sebagai suatu museum. Hal ini didasari sebagai dampak dari terjadinya Gerakan Anti Swapraja yang menyebabkan Mangkunegaran tidak memiliki kuasanya sebagai suatu sistem pemerintahan. Dibukanya Mangkunegaran kepada umum didasari atas keinginan Mangkunegara VIII agar budaya dan sejarah dari adanya Mangkunegaran bisa diterima dan diketahui oleh orang banyak.

Kisaran tahun ini diambil dikarenakan ada hal-hal yang dirasa ingin digali dan diangkat berada di tahun-tahun masa pemerintahan Mangkunegara VIII sebagai seorang pemimpin dalam masa-masa awal pemerintahan Bangsa Indonesia. Kepentingan diadakannya penelitian ini dirasa penting, mengingat jasa dan kepemimpinan yang bisa diteladani dari Sri Mangkunegara VIII. Selain Sri Mangkunegara VIII pula banyak pembahasan mengenai Kota Surakarta yang juga perlu mendapatkan sorotan lebih, mengingat banyaknya peristiwa sejarah nasional yang terjadi di kota ini. Selain hal tersebut juga penulisan hasil penelitian ini bisa dijadikan salah satu sumber bagi penulisan lainnya mengenai Kota Surakarta di masa-masa pemerintahan Sri Mangkunegara VIII.

Sebagai suatu kerajaan yang sudah memiliki tatanan yang sudah ada sejak berabad-abad lamanya, Surakarta menjadi salah satu tempat aman hingga menjadi suatu kota yang terancam akan keberadaannya pada masa tersebut bagi negara yang baru. Keberadaan sejarah Kota Surakarta juga ingin diangkat mengingat saat ini Kasunanan Surakarta terkhusus Kadipaten Mangkunegaran kurang mendapatkan perhatian di mata masyarakat Indonesia yang berbanding terbalik dengan keadaan Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman yang hingga saat ini masih memiliki banyak atensi dari masyarakat Indonesia. Karena sejatinya adanya

kerajaan-kerajaan ini memiliki sejarah penting bagi peradaban Indonesia yang perlu diketahui oleh masyarakat Indonesia itu sendiri.

Fokus penelitian yang ingin dikaji dalam penelitian kali ini pula merupakan penelitian mengenai pemerintahan Surakarta pada masa pemerintahan Sri Mangkunegara VIII sebelum dan sesudah terjadinya pengambilan daerah istimewa di Surakarta. Hal ini menjadi suatu fokus penelitian yang ingin dikaji mengingat banyaknya penelitian mengenai bagaimana Surakarta kehilangan daerah istimewanya dan bagaimana gerakan anti swapraja terjadi. Dalam penelitian ini, penulis ingin lebih menekankan kepada bagaimana pemerintahan di Surakarta pada masa pemerintahan Sri Mangkunegara VIII dari birokrasi tradisionalnya yang sudah ada sejak berabad-abad, hingga pada saat Indonesia merdeka Surakarta mengajukan diri untuk bergabung dengan suatu republik dengan berbentuk daerah istimewa hingga bagaimana pemerintahannya di masa-masa setelah diambilnya daerah istimewa tersebut.

Penulisan mengenai topik Mangkunegaran di masa pemerintahan Mangkunegara VIII sudah beberapa kali di tulis. Tahun 2013, Setiawan membahas mengenai biografi Mangkunegara VIII, dimulai sejak masa kecilnya hingga hari-hari menjelang wafat, hal ini juga mencakup mengenai bagaimana peran dari Mangkunegara VIII dalam mengurus urusan Mangkunegaran setelah kejadian Anti Swapraja dalam sosial dan politiknya. Pranista (2017) menulis mengenai bagaimana Mangkunegara VIII dalam mengurus wilayahnya dalam kondisi pemerintahan yang sudah berbeda antara Belanda dan Jepang. Selanjutnya Basuki (2010) menulis tentang bagaimana peranan dan pandangan dari Komisi Dana Milik Mangkunegaran di bawah pemerintahan Mangkunegara VIII dalam mengurus aset-aset Mangkunegaran yang di nasionalisasi.

Riset lainnya dilakukan oleh Caesariko pada tahun 2021 yang menyoroti mengenai bagaimana Mangkunegara VIII dalam melestarikan tarian Bedhaya Anglir Mendhung di tahun-tahun setelah terjadinya peristiwa gerakan sosial di Surakarta. Dan dalam riset terakhir yang ditemukan oleh penulis yaitu yang ditulis oleh Sandhy (2022) berkenaan dengan bagaimana Praja Mangkunegaran di tahun-tahun awal kemerdekaan mempertahankan kedudukannya, hingga akhirnya terjadi

gerakan sosial di Surakarta hingga Mangkunegaran tidak dianggap sebagai suatu pemerintahan yang berdaulat di Surakarta.

Penelitian ini tentunya akan berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis akan lebih menyoroti mengenai bagaimana keadaan Mangkunegaran di masa sebelum, saat terjadi, dan sesudah terjadinya Gerakan Anti Swapraja di Surakarta. Hal ini juga akan menekankan, bagaimana dampak yang ditimbulkan dari adanya gerakan tersebut bagi Kadipaten Mangkunegaran di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Oleh karena hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengenai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara VIII dengan judul **“Dampak Gerakan Anti-Swapraja Bagi Kadipaten Mangkunegaran di Masa Pemerintahan Mangkunegara VIII (1944-1968)”** yang di dalamnya akan membahas mengenai bagaimana Kadipaten Mangkunegaran pada masa pemerintahan Mangkunegara VIII di kisaran tahun 1944 hingga 1968 dalam menghadapi dampak Gerakan Anti-Swapraja. Dalam masa pemerintahan beliau juga terdapat dua hal penting yang terjadi dan berakibat pada pemerintahan di Surakarta, yaitu Pengambilan Daerah Istimewa Surakarta yang dalam menuju kepada hal tersebut banyak sekali kejadian yang terjadi di Surakarta dimulai dari adanya gerakan-gerakan separatis yang menyebabkan terjadinya beberapa kerusuhan di Surakarta hingga berakibat pada pengambilan daerah istimewa di Surakarta. Hingga peneliti ingin mengemukakan mengenai bagaimana keadaan di Surakarta pada masa pergantian pemerintahan tersebut dari yang sebelumnya merupakan sistem pemerintahan kerajaan hingga penggantinya kepada sistem pemerintahan yang berbentuk demokrasi, buntut dari pemerintahan yang dilakukan langsung oleh pemerintahan Indonesia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari hasil pemaparan latar belakang di atas, yang menjadi pokok penelitian dari topik yang akan dikaji adalah “Bagaimana Kadipaten Mangkunegaran di bawah Pemerintahan Mangkunegara VIII, dimulai dari Pengambilan Daerah Istimewa Surakarta dan Dampak dari Pengambilan tersebut bagi Pemerintahan di Surakarta tahun 1944-1974?”. Agar lebih memfokuskan aspek pembahasan masalah, peneliti mengerucutkan perumusan masalah sebagai berikut:

Muhamad Rio Novandana, 2023

**DAMPAK GERAKAN ANTI SWAPRAJA BAGI KADIPATEN MANGKUNEGARAN DI MASA PEMERINTAHAN MANGKUNEGARA VIII (1944-1974)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Bagaimana kondisi Mangkunegaran pada masa awal pemerintahan Mangkunegara VIII (1940-1945)?
2. Bagaimana Gerakan Anti Swapraja terjadi di Daerah Istimewa Surakarta (1945-1946)?
3. Bagaimana kondisi politik dan ekonomi Kadipaten Mangkunegaran di bawah pemerintahan Mangkunegara VIII setelah terjadinya Gerakan Anti Swapraja (1946-1979)?
4. Bagaimana kondisi sosial dan budaya Kadipaten Mangkunegaran di bawah pemerintahan Mangkunegara VIII setelah terjadinya Gerakan Anti Swapraja(1946-1968)?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah memberikan pemahaman dan gambaran yang lebih jelas dari berbagai sumber mengenai Dampak Gerakan Anti Swapraja bagi Mangkunegaran pada masa Pemerintahan Mangkunegara VIII tahun 1944-1974. Sementara tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Memaparkan kondisi Surakarta khususnya Kadipaten Mangkunegaran di masa sebelum dan di awal masa pemerintahan Mangkunegara VIII
2. Menguraikan latar belakang alasan terjadinya gerakan Anti Swapraja hingga diambilnya pemerintahan Daerah Istimewa di Surakarta pada masa pemerintahan Mangkunegara VIII.
3. Menjelaskan bagaimana upaya Kadipaten Mangkunegaran di bawah pemerintahan Mangkunegara VIII pada saat mengalami dan menata kembali politik dan ekonomi di Mangkunegaran setelah terjadinya Gerakan Anti Swapraja.
4. Menjelaskan bagaimana upaya Kadipaten Mangkunegaran di bawah pemerintahan Mangkunegara VIII pada saat mengalami dan menata kembali sosial dan budaya di Mangkunegaran setelah terjadinya Gerakan Anti Swapraja.
5. Menjadi salah satu sumber bacaan yang lengkap mengenai bagaimana kondisi Mangkunegaran masa awal pemerintahan Mangkuengara VIII dan latar belakang dari terjadinya Gerakan Anti Swparaja, proses berjalannya gerakan, hingga akhir dan dampak dari adanya gerakan tersebut.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Secara umum atau teoritis manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu menambah pemahaman mengenai Kadipaten Mangkunegaran di bawah Pemerintahan Mangkunegara VIII di sekitaran tahun 1944-1974 dalam menghadapi dampak Gerakan Anti-Swapraja.

### 2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat mengandung manfaat praktis berupa:

- a. Melengkapi rekonstruksi peristiwa sejarah mengenai Kadipaten Mangkunegaran pada masa pemerintahan K.G.P.A.A Mangkunegara VIII.
- b. Memperkaya pengetahuan pembaca dari berbagai kalangan mengenai permasalahan politik pemerintahan di Surakarta khususnya Kadipaten Mangkunegaran yang terjadi pada masa pemerintahan K.G.P.A.A Mangkunegara VIII.
- c. Menambah sumber mengenai bagaimana keadaan Surakarta khususnya Kadipaten Mangkunegaran di bawah pemerintahan Mangkunegara VIII dalam menyikapi perubahan yang terjadi di Surakarta setelah terjadinya Gerakan Anti Swapraja hingga diambilnya pemerintahan Daerah Istimewa di Surakarta dalam bidang politik, administrasi, sosial, dan budaya.
- d. Menambah sumber bahan ajar sejarah mengenai Kadipaten Mangkunegaran dan K.G.P.A.A Mangkunegara VIII yang berhubungan dengan materi dalam pelajaran Sejarah Indonesia kelas XII, Kompetensi Dasar 3.2 Mengevaluasi peran dan nilai-nilai perjuangan tokoh nasional dan daerah dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia pada masa 1945-1965.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Pada bab pertama ini penulisan mengemukakan latar belakang mengenai apa yang akan dikaji dalam penelitian, hal lain yang akan ada dalam penelitian ini seperti latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan



penelitian, manfaat penelitian, metodologi dan sistematika penulisan, untuk selanjutnya menjadi dasar bagi penulisan bab setelahnya.

## Bab II : Kajian Pustaka

Kajian pustaka akan membahas mengenai konsep dan teori dan kaitannya dengan topik penelitian itu sendiri. Lainnya yang akan dimuat seperti penelitian terdahulu yang digunakan sebagai contoh dan juga sebagai suatu ancangan agar tidak terjadinya plagiarism dari apa yang peneliti sebelumnya telah dibahas dengan materi yang sama. Adapun beberapa teori dan konsep yang digunakan diantaranya, teori kedaulatan yang dimana di dalamnya terdapat teori kedaulatan raja, dan teori kedaulatan rakyat. Selain teori tersebut terdapat teori konflik, teori konflik yang dipergunakan merupakan teori konflik yang dikemukakan oleh Dahrendorf yang secara singkat mengemukakan jika teori konflik ini didasari pada adanya konflik yang terjadi disebabkan oleh adanya penguasa yang ingin mempertahankan statusnya, dan pihak yang dikuasai menginginkan untuk terjadinya perubahan. Selain itu terdapat pula konsep yang diambil yaitu merupakan konsep pemerintahan pusat dan pemerintahan swapraja. Diambilnya konsep ini karena dirasa jika adanya suatu hubungan yang harus dikaji mengenai Kadipaten Mangkunegaran itu sendiri kepada pemerintah pusat yang dimana dalam pembahasan ini merupakan Pemerintahan Republik Indonesia.

## Bab III : Metode Penelitian

Merupakan bagian terpenting dalam melakukan penelitian, dalam metode akan membahas mengenai metode atau tata cara penulisan dalam pembuatan penelitian. Metode ini penting adanya sebagai suatu upaya bagaimana peneliti bisa menemukan apa yang akan dibahas pada bab selanjutnya. Adapun metode yang akan dikaji dalam bab tiga ini merupakan metode historis, metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian sejarah yang dikemukakan oleh Ismaun yaitu berupa heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Di dalam bab ini pula mengenai heuristik dijabarkan mengenai persiapan penelitian yang dikemukakan, kemudian mengenai penentuan dan pengajuan topik penelitian, lalu penyusunan rancangan penelitian, setelahnya proses bimbingan, lalu pelaksanaan

penelitian. Lalu dalam kritik sumber dilakukan kritik yang dilakukan kepada sumber-sumber yang sebelumnya telah ditemukan di masa pengumpulan sumber atau heuristik, dalam kritik ini juga dilakukan dengan dua cara, yaitu kritik internal dan eksternal, dalam kritik ini pula selain sumber yang berasal dari arsip-arsip, selanjutnya juga dilakukan kritik mengenai hasil wawancara yang dilakukan dengan seorang kerabat dekat kerajaan Mangkunegaran. Selanjutnya dalam tahap interpretasi dimana dilakukan perangkaian dan penjabaran mengenai hasil-hasil pencarian sumber yang dilakukan. Dan setelahnya di dalam historiografi dituliskan mengenai hasil-hasil penalaran dari sumber-sumber yang didapat untuk kemudian menuliskannya dalam hasil dan pembahasannya.

#### Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Pada bab keempat ini dijabarkan tentang apa yang ditemukan mengenai judul yang diangkat, di dalamnya juga dalam penulisannya menggunakan sumber dan rujukan untuk memperkuat isi dari penulisan. Dan dalam bab ini juga akan menjawab mengenai rumusan masalah yang sebelumnya diambil. Di rumusan masalah pertama yaitu mengenai Kadipaten Mangkunegaran sebelum Mangkunegara ke VIII, yang dimana di dalamnya membahas mengenai poin-poin seperti masa-masa menjelang pemerintahan Mangkunegara VIII, lalu poin kedua yaitu keadaan Kadipaten Mangkunegaran masa awal pemerintahan Mangkunegara VIII. Dalam rumusan masalah kedua mengenai gerakan Anti-Swapraja hingga diambilnya Daerah Istimewa Surakarta, yang poin-poinnya yaitu latar belakang dan proses Gerakan Anti-Swapraja Surakarta, lalu poin keduanya yaitu Gerakan Anti Swapraja hingga revolusi sosial di Surakarta hingga diambilnya DIS. Dalam rumusan masalah ketiga yaitu berkaitan dengan politik dan administrasi Mangkunegaran, yang di dalamnya terdapat poin latar belakang politik dan administrasi Mangkunegaran masa awal Mangkunegara VIII, lalu selanjutnya yaitu dampak politik dan administrasi Mangkunegaran setelah terjadinya Revolusi Sosial di Surakarta dan upaya Mangkunegara VIII mempertahankannya. Dalam rumusan masalah terakhir yang mengangkat mengenai sosial budaya Mangkunegaran yang membahas mengenai sosial dan budaya Mangkunegaran masa awal Mangkunegara VIII, lalu dampak sosial

dan budaya Mangkunegaran setelah terjadinya Revolusi di Surakarta dan upaya Mangkunegara VIII mempertahankannya.

#### Bab V : Kesimpulan dan Saran

Sebagai bab terakhir, dalam bab ini akan menjelaskan masalah yang sudah dibahas sebelumnya dan ditemukan jawabannya dengan cara penulisan yang lebih ringkas, peneliti juga akan memberikan saran mengenai penulisan-penulisan lain yang akan mengangkat tema yang berkesinambungan dengan judul dan tema yang ditulis dalam penulisan ini.